

**PERAN KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MEMBANGUN DISIPLIN KERJA
UNTUK MENJAGA PRODUKTIVITAS ANGGOTA KPU PROVINSI BALI**

**Ni Putu Riza Maharani¹, I Gusti Ayu Agung Dewi Sucitawathi Pinatih², Melati Budi Srikandi³, I
Wayan Joniarta⁴**

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Pendidikan Nasional

Email Korespondensi: rizamaharani@gmail.com

Email: iga_dewi@undiknas.ac.id;melatib@undiknas.ac.id;wayanjoniarta@undiknas.ac.id;

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of organizational communication in building work discipline to maintain employee productivity at the Provincial General Election Commission (KPU) of Bali. As an election management institution, KPU requires effective coordination and procedural compliance to ensure that every stage of the election is implemented accurately and on time. This research employs a qualitative descriptive approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that organizational communication significantly contributes to strengthening employee discipline and productivity. The application of formal communication network patterns wheel, Y, circle, chain, and all channel is implemented situationally and complementarily to optimize internal coordination. The wheel and chain patterns support procedural compliance, the Y pattern facilitates supervision, the circle pattern enhances participation and evaluation, while the all-channel pattern accelerates decision-making in operational crisis situations. These results affirm that the success of election administration is influenced by the organization's ability to manage communication adaptively and systematically.

Keywords: Organizational Communication, Formal Communication Networks, Bali Provincial KPU.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran komunikasi organisasi dalam membangun disiplin kerja untuk menjaga produktivitas pegawai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memerlukan koordinasi kerja yang efektif dan kepatuhan terhadap prosedur untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan tepat waktu dan akurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi organisasi memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kedisiplinan dan produktivitas pegawai. Penerapan pola jaringan komunikasi formal pola roda, pola Y, pola melingkar, pola rantai, dan pola Bintang dilaksanakan secara situasional dan saling melengkapi untuk memperkuat koordinasi internal. Pola roda dan rantai efektif menjaga kepatuhan prosedural, pola Y mendukung supervisi, pola melingkar meningkatkan partisipasi dan evaluasi, sedangkan pola bintang mempercepat pengambilan keputusan pada situasi krisis operasional. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu dipengaruhi oleh kemampuan organisasi mengelola komunikasi secara adaptif dan terstruktur.

Kata kunci: Komunikasi Organisasi, Jaringan Komunikasi Formal, KPU Provinsi Bali.

PENDAHULUAN

Komunikasi organisasi merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi dalam organisasi berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, koordinasi, dan pembentukan hubungan kerja yang efektif antar anggota organisasi (Khovivah et al., 2025). Komunikasi yang berjalan secara efektif mampu menciptakan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

89

Indexed



pemahaman yang selaras mengenai visi dan pelaksanaan tugas sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif (Nurrahmawati et al., 2025).

Efektivitas komunikasi organisasi menjadi variabel penting dalam meningkatkan kinerja lembaga, terutama dalam konteks organisasi publik yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang terstruktur (MahendSSra, 2025). Komunikasi tidak hanya sebatas penyampaian pesan, melainkan sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh elemen organisasi agar mampu bekerja secara sinergis demi mencapai tujuan bersama. Ketika komunikasi tidak berjalan baik, maka akan muncul hambatan seperti kesalahpahaman, konflik, dan menurunnya produktivitas (Darmawan et al., 2025). Di sisi lain, disiplin kerja merupakan faktor krusial yang menentukan kualitas kinerja aparatur. Disiplin kerja mencerminkan kepatuhan pegawai dalam menaati peraturan, prosedur, serta tanggung jawab yang telah ditetapkan organisasi (Aprelyani, 2025). Disiplin kerja yang tinggi mendorong etos kerja, ketepatan waktu, serta penyelesaian tugas sesuai target sehingga berdampak langsung pada meningkatnya produktivitas lembaga (Halawa, 2025). Sebaliknya, rendahnya disiplin kerja dapat menyebabkan keterlambatan, penurunan motivasi, serta berkurangnya efektivitas pelaksanaan program.

Hubungan antara komunikasi organisasi dan disiplin kerja bersifat saling mendukung. Komunikasi yang jelas dan terstruktur membantu pegawai memahami aturan dan tanggung jawab, sehingga meningkatkan tingkat kedisiplinan kerja. Sebaliknya, disiplin kerja yang baik mendukung kelancaran komunikasi melalui pelaksanaan instruksi dan pelaporan secara tepat waktu (Junita et al., 2023). Dengan demikian, efektivitas komunikasi organisasi berkontribusi signifikan terhadap pembentukan budaya kerja disiplin yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas lembaga. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan pemilu. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU membutuhkan komunikasi organisasi yang efektif dan disiplin kerja yang tinggi untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan tepat waktu, akurat, dan sesuai aturan (Fauziah, 2024). Berdasarkan hasil rekap penilaian kinerja pegawai KPU Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2025, seluruh pegawai mendapatkan predikat kinerja “Baik”. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas pegawai terjaga, namun tetap diperlukan penguatan aspek komunikasi dan kedisiplinan agar kinerja dapat terus meningkat.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran komunikasi organisasi dalam membangun disiplin kerja guna menjaga produktivitas pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan teori jaringan komunikasi formal menjelaskan bahwa pola komunikasi dalam organisasi terbentuk berdasarkan struktur kewenangan yang berlaku, di mana setiap anggota saling terhubung untuk menyalurkan informasi, instruksi, dan koordinasi kerja secara terarah. Harjana (2016) menjelaskan bahwa jaringan komunikasi formal dapat berbentuk pola roda, Y, melingkar, rantai, dan bintang, yang masing-masing mencerminkan cara aliran informasi berlangsung dari pimpinan kepada anggota atau antaranggota organisasi. Pola-pola tersebut menggambarkan perbedaan tingkat kontrol, arah komunikasi, dan keterlibatan setiap individu dalam proses komunikasi, sehingga memengaruhi efektivitas penyampaian pesan dan kinerja organisasi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi manajemen komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan fenomena secara rinci dan sistematis berdasarkan kondisi nyata di lapangan dengan memanfaatkan data non-numerik, seperti hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Fokus pendekatan ini bukan untuk menghasilkan generalisasi statistik, tetapi untuk memahami makna, sudut pandang, serta pengalaman informan dalam konteks alami mereka.

Menurut Gunadi (2024), metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memaparkan fenomena apa adanya tanpa melakukan manipulasi variabel maupun perlakuan khusus terhadap objek penelitian.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses komunikasi organisasi dan penerapan disiplin kerja pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali dalam menjaga produktivitas anggotanya.

Penelitian deskriptif kualitatif menitikberatkan pada penelusuran makna di balik pengalaman, perilaku, serta interaksi sosial informan, bukan pada penyajian angka atau statistik (Mardiah, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengutamakan jumlah sampel yang besar, melainkan kedalaman informasi serta kekayaan makna yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi mendalam (Rahmah, 2020).

PEMBAHASAN

Definisi Komunikasi Organisasi

Goldhaber (1986) dalam (Muhammad, 2017) memberikan definisi Komunikasi organisasi merupakan suatu proses penciptaan dan pertukaran pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain, yang bertujuan untuk mengatasi ketidak pastian lingkungan yang bersifat dinamis dan selalu berubah. Selain itu (Dewi et al., 2025) menyampaikan bahwa Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks.

Produktivitas Anggota

Produktivitas anggota di organisasi dapat didefinisikan sebagai ukuran yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi individu dalam menghasilkan keluaran kerja yang sesuai dengan sasaran organisasi. Dalam pengertian ini, produktivitas tidak hanya menilai kuantitas hasil kerja, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan nilai *output* yang dihasilkan dalam rangka pencapaian target organisasi. Secara operasional, produktivitas anggota dapat diartikan sebagai rasio antara hasil kerja (*output*) dengan sumber daya yang digunakan (*input*) dalam suatu periode waktu tertentu, yang mencerminkan kemampuan anggota dalam menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal (Hardiyati, 2024).

Disiplin Kerja

Disiplin kerja merupakan sikap mental dan kesadaran individu yang mencerminkan kesiapan, kesediaan, dan kemampuan untuk mematuhi seluruh norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di lingkungan organisasi kerja (Adnyana et al., 2025).

KPU Provinsi Bali

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali merupakan lembaga penyelenggara pemilu tingkat provinsi yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilihan umum di wilayah Bali secara profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Sebagai bagian dari struktur KPU RI, lembaga ini bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai proses kepilwuan mulai dari perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih tetap, pendidikan pemilih, pengelolaan logistik, hingga pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara.

Teori Jaringan Komunikasi Formal

Jaringan komunikasi formal merupakan bagian dari Teori Komunikasi Organisasi. Di dalam organisasi terdapat pihak-pihak yang saling berhubungan satu sama lain. Jaringan atau pola komunikasi dalam organisasi akan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasinya. Jaringan Komunikasi Formal muncul sebagai pelaksana dari struktur kewenangan hierarkis, yang dibangun oleh pimpinan organisasi untuk menyalurkan informasi yang memberikan kepastian tentang pekerjaan ke seluruh anggota organisasi. Bentuk atau pola komunikasi dibagi dalam beberapa jenis. Pada jaringan komunikasi organisasi formal dibagi menjadi 5 pola yaitu:

- a. Pola Komunikasi Roda (*Wheel Communication*)

Posisi utama dalam komunikasi organisasi yang berpola roda dipegang oleh seorang pemimpin

- yang memiliki pengaruh atau kendali atas proses penyampaian pesan atau informasi. Oleh karena itu, pimpinan atau atasan harus diberitahu terlebih dahulu segala informasi yang ada dalam organisasi.
- b. Pola Komunikasi Y (Komunikasi Y Terbalik)
Organisasi dengan pola Y dalam berkomunikasi memiliki supervisor atau pemimpin yang jelas. Setiap peserta memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan dari dua peserta lainnya.
 - c. Pola Komunikasi Melingkar (*Circle Communication*)
Komunikasi organisasi dengan pola lingkaran memungkinkan anggota saling berkomunikasi dengan oleh dua anggota lainnya di sisinya. Sifat komunikasinya lateral. Tidak ada yang berkuasa dalam pola lingkaran, setiap orang diposisikan sama.
 - d. Pola Komunikasi Rantai atau Bersambung (*Chain Communication*)
Pola rantai memiliki aspek penting, seperti fakta bahwa anggota di posisi tengah memimpin anggota lainnya. Orang di akhir rantai hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja.
 - e. Pola Komunikasi Bintang atau Menyeluruh (*All Channel Communication*)
Semua anggota organisasi dengan struktur komunikasi pola bintang atau komunikasi semua saluran memiliki kapasitas untuk memberikan pengaruh satu sama lain. Tidak ada pemimpin dalam pola komunikasi bintang, tetapi seseorang dapat mengambil peran sebagai pemimpin (Harjana, 2016, h. 168-170).

Komunikasi organisasi memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas koordinasi internal serta keberhasilan pelaksanaan tugas kelembagaan, terutama dalam konteks birokrasi publik seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali yang bekerja dalam sistem prosedural ketat dengan tuntutan akuntabilitas dan ketepatan waktu yang tinggi. Dalam lembaga penyelenggara pemilu, kesalahan komunikasi dapat berdampak pada munculnya misinformasi, bias keputusan, kegagalan pelaksanaan tahapan teknis, hingga menurunnya kredibilitas institusi di mata publik. Oleh karena itu, komunikasi yang terstruktur dan sistematis menjadi instrumen utama yang menjaga stabilitas manajemen pemilu. Berdasarkan teori Jaringan Komunikasi Formal (Harjana, 2016), pola komunikasi organisasi terbentuk berdasarkan struktur hierarkis yang menentukan arah aliran informasi dan tingkat otoritas pengambilan keputusan di dalam organisasi. Pola tersebut mencakup pola roda, pola Y, pola melingkar, pola rantai, dan pola bintang, yang masing-masing memiliki karakteristik, tujuan operasional, dan dampak berbeda terhadap efektivitas kerja.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik manajerial KPU Provinsi Bali, kelima pola jaringan komunikasi formal tidak hanya muncul sebagai bentuk struktural organisasi, tetapi berfungsi sebagai mekanisme koordinasi yang saling melengkapi dalam mendukung kedisiplinan dan produktivitas pegawai. Pola komunikasi tidak berjalan tunggal, melainkan digunakan secara situasional sesuai kebutuhan operasional, tingkat urgensi, serta struktur otoritas yang berlaku pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, dinamika komunikasi organisasi di KPU Provinsi Bali mencerminkan integrasi antara kontrol birokratis dan fleksibilitas adaptif. Pembahasan berikut menguraikan penerapan dan kontribusi masing-masing pola terhadap kinerja organisasi.

1. Pola Roda

Pola roda mencerminkan aliran komunikasi yang terpusat pada pimpinan sebagai pusat kendali dan sumber utama keputusan strategis. Berdasarkan temuan lapangan, pola ini menjadi pola komunikasi dominan dalam tahapan penyusunan kebijakan, pemberian instruksi resmi, serta koordinasi pelaksanaan program yang menuntut keseragaman pemahaman dan ketaatan struktural. Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Bali berperan sebagai simpul utama yang menjamin konsistensi informasi, sekaligus mengontrol arah koordinasi kerja antarbidang.

Seorang informan menyampaikan:

“Semua instruksi penting harus melalui pimpinan. Kami menunggu arahan resmi sebelum melakukan langkah teknis agar tidak terjadi perbedaan keputusan antar divisi.” (*I Dewa Agung Gede Lidartawan, Wawancara Desember 2025*)

Penggunaan pola roda berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi organisasi karena memastikan keputusan strategis bersumber dari otoritas tunggal, sehingga mengurangi risiko kesalahan prosedur dan potensi konflik koordinasi. Hal ini sangat krusial dalam sistem penyelenggaraan pemilu yang berisiko tinggi terhadap kesalahan administratif. Namun demikian, pola ini juga berpotensi menciptakan ketergantungan berlebih terhadap pimpinan apabila tidak diimbangi oleh pembagian kewenangan dan komunikasi terbuka. Dengan demikian, efektivitas pola roda ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan dalam mengelola informasi secara transparan, cepat, dan responsif tanpa memunculkan kesan birokratis yang berlebihan.

2. Pola Y

Pola Y muncul dalam struktur komunikasi yang membutuhkan mediator atau koordinator divisi sebagai penghubung antara pimpinan dan staf pelaksana. Temuan menunjukkan bahwa pola ini digunakan sebagai sistem penyaringan dan verifikasi informasi sebelum mencapai tingkat otoritas tertinggi. Pola Y berperan penting dalam mekanisme pelaporan, supervisi program, dan penyelesaian masalah teknis secara bertahap.

Sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Setiap persoalan dari staf biasanya disampaikan terlebih dahulu kepada koordinator. Jika perlu keputusan pimpinan, baru diteruskan ke atas.” (*I Made Oka Purnama, Wawancara Desember 2025*)

Penerapan pola Y mencegah penumpukan komunikasi langsung kepada pimpinan yang dapat menghambat proses kerja. Selain itu, pola ini memungkinkan kontrol dan evaluasi internal agar kesalahan dapat diidentifikasi sebelum berdampak lebih luas. Dalam dimensi disiplin, pola Y menegakkan tata kelola komunikasi yang sesuai hierarki, sehingga pegawai terbiasa mengikuti jalur penyampaian informasi secara formal. Dari perspektif produktivitas, pola Y mempercepat penyelesaian persoalan teknis karena banyak masalah dapat diselesaikan di tingkat menengah tanpa harus menunggu keputusan senior.

3. Pola Melingkar

Pola melingkar merupakan pola komunikasi lateral yang menempatkan setiap anggota organisasi pada posisi setara, terutama digunakan saat forum diskusi, brainstorming, dan rapat evaluasi setelah penyelesaian tahapan pemilu. Dalam KPU Provinsi Bali, pola ini aktif digunakan untuk memperbaiki SOP, menyusun strategi perbaikan layanan publik, dan merumuskan langkah teknis berdasarkan data lapangan. Seorang informan menjelaskan:

“Dalam rapat evaluasi mingguan pendapat atau masukan dari anggota akan ditampung terlebih dahulu oleh Kepala Bagiannya lalu akan disampaikan Kembali pada rapat bersama Pimpinan. Beberapa perubahan kerja muncul dari masukan staf pelaksana lapangan.” (*I Wayan Gede Budiarta, Wawancara Desember 2025*)

Pola melingkar memperkuat budaya komunikasi yang demokratis dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan melalui partisipasi aktif pegawai. Komunikasi horizontal juga berkontribusi pada peningkatan kreativitas dan inovasi karena seluruh anggota didorong untuk mengemukakan perspektif dan pengalaman praktis. Pola ini menjadi penyeimbang pola roda dengan membuka ruang dialog dan mengurangi jarak psikologis antara pimpinan dan bawahan. Secara motivasional, pola melingkar meningkatkan keterlibatan kerja karena pegawai merasa dihargai dan diakui kontribusinya.

4. Pola Rantai

Pola rantai menunjukkan aliran komunikasi vertikal formal yang bergerak secara berjenjang. Pola ini paling menonjol dalam pelaksanaan kegiatan administrasi resmi seperti pengolahan dokumen Daftar Pemilih Tetap (DPT), legalisasi surat, pelaporan hasil pleno, dan distribusi logistik pemilu.

Terkait pentingnya pola ini, informan menyatakan:

“Semua dokumen tidak boleh melompat jalur struktural, harus melewati tahapan yang telah ditentukan untuk menjaga legalitas.” (*I Gusti Gede Made Gustem Lasida, Wawancara Desember 2025*)

Pola rantai berfungsi sebagai instrumen kontrol formal dalam menjaga integritas data, ketertiban dokumentasi, kemampuan audit, serta transparansi keputusan. Dalam penyelenggaraan pemilu, kesalahan administrasi sekecil apa pun dapat menimbulkan sengketa hukum dan mengganggu legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, pola rantai menjadi fondasi bagi pembentukan disiplin kerja yang bersifat prosedural dan sistematis. Dengan penerapan pola rantai, setiap pegawai terlatih mengikuti tahapan kerja secara runtut dan tidak melanggar kewenangan struktural.

5. Pola Bintang

Pola bintang muncul saat organisasi berada dalam situasi operasional kritis yang membutuhkan koordinasi cepat lintas divisi, terutama menjelang hari pemungutan suara. Pada periode tersebut, efektivitas kerja tidak dapat sepenuhnya bergantung pada hierarki formal karena tekanan waktu sangat tinggi.

Informan bagian logistik menjelaskan:

“Menjelang pemilu komunikasi harus cepat. Semua divisi saling koordinasi bersama pimpinan langsung agar masalah bisa selesai saat itu juga tanpa harus menunggu jalur formal.” (*A.A Sagung Manik Vivi Trisia, Wawancara Desember 2025*)

Pola bintang meningkatkan mobilitas informasi, mempercepat pengambilan keputusan operasional, dan memperkuat kerja sama tim. Melalui pola ini, organisasi menjadi adaptif dan responsif dalam menghadapi dinamika lapangan seperti gangguan logistik, kendala teknis sistem informasi, atau hambatan distribusi alat pemilihan. Pola bintang menjadi bukti bahwa organisasi birokratis tidak selalu kaku, melainkan dapat fleksibel ketika diperlukan.

Berdasarkan pembahasan, terlihat bahwa kelima pola jaringan komunikasi formal tidak beroperasi secara tunggal, tetapi saling melengkapi sesuai kebutuhan fungsi manajerial. Pola roda dan rantai mendukung kontrol struktural dan kedisiplinan, pola Y memperkuat supervisi dan koordinasi teknis, pola melingkar meningkatkan partisipasi dan inovasi, serta pola bintang meningkatkan efektivitas operasional saat situasi kritis. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi organisasi di KPU Provinsi Bali tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada kemampuan organisasi mengkombinasikan pola komunikasi sesuai kebutuhan konteks. Pendekatan adaptif tersebut menghasilkan integrasi antara akuntabilitas birokratis dan fleksibilitas kerja, sehingga mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi memiliki peran strategis dalam membangun disiplin kerja guna menjaga produktivitas pegawai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali. Berdasarkan teori Jaringan Komunikasi Formal (Harjana, 2016), ditemukan bahwa penerapan lima pola komunikasi formal yaitu pola roda, pola Y, pola melingkar, pola rantai, dan pola Bintang berjalan secara sinergis dalam mendukung efektivitas koordinasi internal dan kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pola roda dan pola rantai berperan dominan dalam menjaga kepatuhan terhadap prosedur dan instruksi struktural, sehingga memperkuat aspek kedisiplinan pegawai. Pola Y berfungsi sebagai mekanisme supervisi dan penyaringan informasi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

untuk memastikan keakuratan pelaporan serta penyelesaian masalah secara bertahap. Adapun pola melingkar mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif pegawai dalam proses evaluasi dan perbaikan kinerja, sehingga memunculkan inovasi kerja. Sementara pola bintang terbukti efektif digunakan dalam situasi operasional kritis menjelang pemungutan suara karena memungkinkan komunikasi cepat dan kolaborasi lintas divisi tanpa hambatan hierarkis, yang berkontribusi pada stabilitas dan ketepatan waktu pelaksanaan tahapan pemilu.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan KPU Provinsi Bali dalam menjaga produktivitas dan integritas pelaksanaan pemilu tidak hanya bergantung pada kedisiplinan formal, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengkombinasikan dan menyesuaikan pola komunikasi sesuai kebutuhan situasional. Integrasi pola komunikasi formal yang adaptif menjadi kunci terciptanya koordinasi efektif, pengambilan keputusan tepat, dan budaya kerja yang profesional. Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa penguatan manajemen komunikasi, pelatihan keterampilan komunikasi internal, serta optimalisasi sistem koordinasi berbasis teknologi perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan performa organisasi publik.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian komunikasi organisasi dengan menunjukkan relevansi teori jaringan komunikasi formal dalam konteks birokrasi penyelenggara pemilu. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukannya studi komparatif di KPU kabupaten/kota lain atau lembaga publik serupa untuk melihat perbedaan pola komunikasi berdasarkan struktur organisasi, serta penelitian longitudinal guna menilai konsistensi dampak komunikasi terhadap produktivitas pegawai dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam pengembangan strategi komunikasi yang lebih terstruktur, adaptif, serta berorientasi pada peningkatan profesionalitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

REFERENSI

- Adnyana, I. W. E., Tahu, G. P., & Andika, A. W. (2025). Pengaruh Disiplin Kerja, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Hd Motor 99. *Emas*, 6(5), 1020–1036. <https://doi.org/10.36733/emas.v6i5.6691>
- Aprelyani, S. (2025). Peran Disiplin Kerja dan Kompensasi dalam meningkatkan Kinerja Karyawan (Literature Review Manajemen Sumber Daya Manusia). *Dinasti Health and Pharmacy Science*, 2(1), 18–24. <https://doi.org/10.38035/dhps.v2i1.1797>
- Aswaruddin, Halawa Syafitri, Hasibuan Pay Khalid, Dahyanti Nur, & Maulida Widya. (2025). Keterampilan Komunikasi Verbal dan Non Verbal Dalam Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian Dan Inovasi*, 5(1), 18–23. <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i1.1108>
- Dewi, N. N. C., Bani, D. D., & Kartini, N. K. (2025). Implementasi komunikasi organisasi dalam mendukung Kinerja karyawan pt. Ams medika healthcare. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(2), 1089–1098. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i2.2109>
- Fauzan, M., & Yahya, M. (2025). Komunikasi Organisasi Dalam Membangun Sinergitas Organisasi Otonom Cabang Muhammadiyah Belopa Kabupaten Luwu. *Jurnal Komunikasi Dan Organisasi (J-KO)*, 7(1), 21–26. <https://doi.org/10.26618/jko.v7i1.1758>
- Gunadi, G. W. M., & Budiana, I. N. (2024). ASPEK HUKUM DAN MITIGASI RISIKO
- Hardiyati, R., & Anggi Pasca, A. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Produktivitas Anggota Dalam Organisasi. *Journal Of Social Science Research*, 4(3), 16894–16902.
- Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, 8(1), 21-31
- Kuspriyono, T., & Warpindyastuti, L. D. (2023). PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI DAN KEDISIPLINAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KELURAHAN CEGER JAKARTA TIMUR. *Jurnal Pijar*, 1(3), 401-411.
- Mahendra, A., & Putra, P. (2025). Studi Kasus Komunikasi Organisasi Di Perusahaan Startup Berbasis Teknologi. *Economica Insight*, 1(2), 38–43. <https://doi.org/10.71094/ecoin.v1i2.91>

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 1 Januari 2026

- Mardhiah, A. (2025). Strategi Komunikasi Konselor Dengan Pecandu Narkoba Dalam
Nurrahmawati, M., Toni, A., & Prakoso, J. H. (2025). Peran Komunikasi Organisasi dalam Mengubah
Toxic Workplace Environment. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 2034–2040.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.7121>
- Rehabilitasi Rawat Jalan Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gayo Lues.
Robby Darmawan, Sungkono Sungkono, & Maman Mulya Karnama. (2025). Pengaruh Komunikasi
Internal dan Kerjasama Tim terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karawang. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 111–126.
<https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i2.4008>
- Syifa Azwa Fauziah, & Mulyadi, M. (2024). Pengaruh Komunikasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja
Karyawan pada PT Esa Garda Pratama Jakarta Selatan. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(3), 242–
258. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.4002>
- TRANSFORMASI DIGITAL PADA GOVERNMENT SERVICE. *Journal of Syntax Literate*, 9(2).
Wadiv Vatul Khovivah, Mareta Rofiko, Danial Atiq Ma'shum, Santi Nur Holisa, Qinta Istiqlalia Hidayat,
Nikmatul Wafiah, & Mu'alimin Mu'alimin. (2025). Literature Review : Peran dan Strategi
Komunikasi Efektif dalam Manajemen Perubahan Organisasi. *PPIMAN Pusat Publikasi Ilmu
Manajemen*, 3(3), 60–71. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i3.875>